

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan dikatakan baik apabila telah menerapkan asas *good governance*. Penerapan *good governance* diperlukan adanya keselarasan antara tiga faktor utama yaitu pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil (Handayani & Nur, 2019). Ketiga faktor utama tersebut memiliki peran masing-masing untuk mengelola sumber dayanya, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan *World Bank*, *Good Governance* dijelaskan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan yang terstruktur dan akuntabel. Tata kelola pemerintah yang baik atau *Good Governance* sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu tatanan pemerintahan, sekaligus membantu mensinergikan peran antara pemerintah, sektor privat dan masyarakat sipil. *Good Governance* adalah suatu bentuk tatanan yang digunakan negara dengan sistem akuntabel dan transparansi informasi publik yang baik. Negara membutuhkan suatu bentuk kebijakan yang khusus dalam sistem kelembagaan dan tata laksana pemanfaatan atau *ICT (Information Communication and Technology)* dengan tujuan efektif dan efisien seperti *Massive Open Online Courses (MOOC)* yang sudah banyak di kembangkan berbagai negara (Rafiqi et al., 2020).

Indonesia mengeluarkan regulasi mengenai informasi publik Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan dalam penyampaian dan penyediaan informasi publik secara inti dan vertikal. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*. Hal ini menjadi suatu rekomendasi keseriusan pemerintah menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi. *e-Government* merupakan suatu bentuk sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik yang telah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara koheren antara pemerintah dan masyarakat sipil (Gunawan, 2016). Salah satu sistem informasi manajemen yang digunakan

oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), penggunaan aplikasi SIMDA telah dihentikan dan digantikan oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Aplikasi SIMDA maupun SIPD memuat siklus pemerintah daerah yang dimulai dari perencanaan publik, penganggaran publik, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban publik. Dua hal yang termasuk dalam siklus pemerintahan adalah proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan komponen yang harus saling mendukung dan sinkron, karena penganggaran merupakan komponen yang saling berkaitan dan harus berjalan secara konsisten. Perencanaan dan penganggaran yang telah terintegrasi dengan teknologi disebut sebagai perencanaan dan penganggaran elektronik atau *e-Planning* dan *e-Budgeting*.

e-Planning merupakan fitur yang terdapat dalam aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk proses kegiatan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kegiatan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel. *e-Budgeting* merupakan fitur yang terdapat dalam aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun anggaran secara elektronik, berdasarkan penggunaannya di bidang pemerintahan nantinya dapat memproteksi pelaksanaan kegiatan penganggaran di Indonesia. Penerapan sistem penganggaran berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada penelitian Raharjo (2011) mengatakan bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, jika didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, serta realisasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas.

Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dalam wujud *e-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, pada tahun 2020 mendapatkan suatu

rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (DPRD). DPRD menilai bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jember belum mewujudkan pengembangan *e-Government* yang mendukung kinerja pelayanan dan birokrasi. Pemerintah daerah Kabupaten Jember dinilai tidak memiliki desain dan *master plan* yang jelas untuk mendorong program *e-Government*. *e-Government* Kabupaten Jember hanya terhenti pada program penyediaan (sewa) server dan aplikasi kepegawaian untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember.

Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap layanan *e-Government* melalui *e-Planning* dan *e-Budgeting*, sehingga nantinya diperoleh suatu keputusan sebagai dasar rekomendasi untuk layanan *e-Planning* dan *e-Budgeting* ke arah yang efektif dan optimal. Salah satu model evaluasi yang paling tepat dan cocok digunakan yaitu model evaluasi CSE-UCLA.

Pada penelitian Divayana (2015) mengatakan bahwa bentuk evaluasi CSE-UCLA adalah bentuk evaluasi yang dikembangkan oleh Alkin pada tahun 1969-1991. Model evaluasi ini memiliki lima aspek yang terdiri dari *system assessment*, *program planning*, *program implementation*, *program improvement*, *program certification*. Model evaluasi CSE-UCLA dinilai cocok untuk digunakan menilai kinerja program pelayanan untuk kehidupan masyarakat, seperti sistem perpustakaan, perbankan, sistem koperasi, sistem pemerintahan elektronik, pembelajaran elektronik, dan berbagai program lain.

Divayana & Sugiharni (2016) memberikan pendapat bahwa model CSE-UCLA adalah salah satu bentuk evaluasi yang mempunyai 5 komponen evaluasi, yaitu, *system assesment* merupakan komponen evaluasi yang digunakan untuk memberikan informasi dari keadaan sistem, *program planning* merupakan komponen evaluasi kedua yang digunakan untuk membantu memilih program tertentu untuk memenuhi kebutuhan suatu program, *program implementation* yaitu komponen evaluasi ketiga yang digunakan untuk menyiapkan suatu informasi untuk pengenalan program, *program improvement* yaitu yang memberikan informasi tentang fungsi/kinerja program, dan *program certification* yang memberikan informasi tentang manfaat dan kegunaan program.

Peneliti terinspirasi dengan penelitian sebelumnya, dengan keterbaruan (*novelty*) pada penelitian ini adalah inovasi penilaian penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Penelitian ini mengarah pada evaluasi Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan model CSE-UCLA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, dengan judul “**Analisis Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* Menggunakan Model *Center for The Study of Evaluation-University of California in Los Angeles (CSE-UCLA)*”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapat di rumuskan masalah yaitu bagaimana evaluasi penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* menggunakan alat evaluator CSE-UCLA.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan menggunakan alat evaluasi CSE-UCLA.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pemahaman, pengetahuan dan wawasan terkait dengan keberhasilan penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan menggunakan model CSE-UCLA di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di dalam praktek kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas penggunaan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan menggunakan alat evaluasi CSE-UCLA di Pemerintah Kabupaten Jember.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ide atau gagasan dan referensi ilmiah serta memperluas wawasan dan pemahaman mengenai penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan menggunakan model CSE-UCLA di Pemerintah Kabupaten Jember.